## Vol. 3 No. 1, April 2021 | 1-8



# Journal of Religion and Public Health





# Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Informal di Kota Depok

Analysis of Factors Affecting Intention to Pay National Health Insurance Premium among Informal Workers in Depok City

<sup>1</sup>Mualimmatul Hidayah, <sup>2</sup>\*Mochamad Iqbal Nurmansyah <sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

\*corresponding author: iqbalnurmansyah@uinjkt.ac.id

#### Article Info Abstract Article History The existence of inactive BPJS Kesehatan participants who are in Submitted arrears to pay their dues can disrupt the sustainability of the JKN 10 Januari program. Until February 2020, it is known that the proportion of 2021 inactive participants has reached 50%. The group of participants who experienced the highest arrears came from the informal sector workers Accepted who were included in participants who do not receive wages (PBPU). 11 Februari This study was conducted to determine the factors that influence the 2021 intention to pay JKN contributions to informal workers in Depok City in 2020. This study is a quantitative study with a cross-sectional design. **Published** The sample is 110 informal workers in Depok City that selected using 25 Juni 2021 non-probability sampling technique. The research data collection was carried out through a questionnaire distributed online. The results showed that most respondents had the intention of paying JKN contributions $\geq$ Rp. 25,500. Then there is a significant relationship between the attitude variable and the intention to pay JKN contributions (p-value 0.027), where this attitude is obtained from his belief and evaluation of BPJS Kesehatan. Meanwhile, the variable subjective norm (p-value 0.340) and behavior control (p-value 0.093) did not have a significant relationship with the intention to pay JKN contributions. BPJS Kesehatan should adjust the JKN rate to the willingness and ability of participants so that they are willing to pay JKN dues regularly.

Keywords
Willingness to pay, informal sectors, National Health
Insurance, theory of planned behavior

Keberadaan peserta tidak aktif BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran dapat mengganggu sustainabilitas program JKN. Hingga Februari 2020, diketahui proporsi peserta tidak aktif mencapai 50%. Kelompok peserta yang mengalami penunggakan tertinggi berasal dari sektor pekerja informal yang termasuk kedalam Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat membayar iuran JKN pada pekerja informal di Kota Depok Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel merupakan pekerja informal di Kota Depok yang berjumlah 110 orang yang dipilih secara tidak acak (non-probability sampling). Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki niat membayar iuran JKN ≥ Rp. 25.500. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara variabel sikap dan niat membayar iuran JKN (p-value 0,027), dimana sikap tersebut diperoleh dari keyakinan dan evaluasinya terhadap BPJS Kesehatan. Sedangkan pada variabel norma subjektif (p-value 0,340) dan pengendalian perilaku (pvalue 0.093) tidak berhubungan secara signifikan terhadap niat membayar iuran JKN. BPJS Kesehatan diharapkan mampu menyesuaikan tarif JKN dengan kesediaan dan kemampuan peserta agar mereka mau membayarkan iuran JKN secara rutin.

Kata Kunci Keinginan membayar, sektor informal, Jaminan Kesehatan Nasional, theory of planned behavior

#### Pendahuluan

Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdapat dua jenis peserta sebagaimana diatur dalam Perpres RI Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan peserta bukan PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Setiap peserta JKN wajib membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi peserta PBI, iuran ditanggung oleh pemerintah, namun bagi peserta Non – PBI tidak ditanggung oleh pemerintah dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPJS, 2014a).

Menurut data DJSN, diketahui bahwa hingga Februari 2020 cakupan peserta JKN baru mencapai 82,3% atau sebanyak 223.009.215 peserta (DJSN, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa target BPJS Kesehatan belum tercapai yaitu "Cakupan Semesta 2019", dimana paling lambat 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia ditargetkan telah terdaftar sebagai anggota JKN (BPJS, 2014b). Dari data kepesertaan tersebut diketahui bahwa 59,9% merupakan peserta PBI dan 40,1% sisanya merupakan peserta Non-PBI (DJSN, 2020).

Selain cakupan semesta yang belum tercapai, kendala lain yang terjadi ialah adanya peserta yang tidak membayar iuran atau menunggak iuran. Hal ini menyebabkan defisit BPJS Kesehatan yang nantinya mampu mempengaruhi sustainabilitas program JKN. Peserta yang tidak membayar iuran atau menunggak iuran dikategorikan sebagai peserta tidak aktif. Diketahui pada bulan Februari 2020, 50% peserta Non-PBI tidak aktif. Proporsi peserta Non-PBI tidak aktif terbanyak terdapat pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Proporsi peserta tidak aktif pada PBPU tersebut terus meningkat, diketahui pada bulan Desember 2019 proporsi tersebut mencapai 44,5%, kemudian pada Januari 2020 sebesar 44,9% dan terakhir pada Februari 2020 mencapai 48,8% (DJSN, 2020).

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang bekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri atau pekerja yang berada pada sektor informal (Nurbaeti & Batara, 2018). Menurut Undang – Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan usaha sektor informal yaitu kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha Bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pekerja informal pada UU tersebut yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan atau imbalan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan jaminan kesehatan nasional adalah keberadaan sektor informal yang memiliki jumlah yang banyak serta kurang terorganisir, sehingga dibutuhkan dorongan untuk meningkatkan kesadaran membayar iuran (Oktora, 2016).

Membayar iuran merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang. Ajzen dalam teori planned behavior (Ajzen, 1991), mengemukakan bahwa niat seseorang merupakan prediktor atau perkiraan terbaik untuk mengetahui perilaku seseorang. Niat merupakan indikasi seberapa keras orang mau mencoba atau seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Niat seseorang secara tidak langsung beberapa latar belakang, yang kemudian dapat dibagi menjadi latar belakang individual, sosial dan informasi (Ajzen & Fishbein, 2005). Niat seseorang dalam membayar asuransi dapat dipengaruhi langsung oleh sikap, norma subjektif dan pengendalian perilaku, sebagaimana yang telah diteliti oleh (Brahmana et al., 2018), (Azizam et al., 2020) dan (Pratiwi & Hartoyo, 2014). Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kelompok peserta yang mengalami penunggakan tertinggi berasal dari sektor pekerja informal yang termasuk kedalam pekerja bukan penerima upah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi niat membayar iuran JKN pada pekerja sektor informal di Kota Depok..

### Material dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Pada penelitian cross sectional variabel dependen dan independen diukur satu kali dalam waktu yang sama (Triwardani, 2017). Penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juli tahun 2020. Kota Depok dipilih menjadi lokasi penelitian. Hal tersebut dikarenakan besarnya proporsi peserta Non-PBI yaitu 63,6% dari keseluruhan peserta, dengan proporsi PBPU sebesar 35,9% (DJSN,2020). Kemudian diketahui bahwa 50,0% peserta Non-PBI tersebut tidak aktif, dimana proporsi PBPU yang tidak aktif mengalami peningkatan. Pada Januari 2020 diketahui proporsi tersebut sebesar 39,8% kemudian pada Februari 2020 proporsi meningkat menjadi 42,2% (DJSN,2020).

Populasi pada penelitian ini adalah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan di kota Depok. Kriteria inklusi sampel penelitian adalah 1) Pekerja informal dan 2) Berdomisili di kota depok. Kriteria eksklusi sampel penelitian adalah Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam tanggungan keluarga. Batas minimal sampel diukur berdasarkan rumus Lameshow. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui batas minimal sampel sebanyak 100 orang. Peneliti kemudian menambahkan sampel cadangan sebesar 10% atau sebanyak 10 orang. Maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 110 orang. Penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor: Un.01/F.10/KP.01.1/KE/SP/05.08.015/2020.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui instrumen penelitian kuesioner yang nantinya akan disebarkan secara online pada responden penelitian. Pada penelitian ini data primer menjadi sumber data utama. Terdapat dua analisis data yang dilakukan pada penelitian yaitu analisis univariat dan bivariat. Tahap pertama dilakukan analisis univariat, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran dan distribusi masing – masing variabel. Kemudian dilakukan analisis bivariat, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan variabel independent dan variabel dependen. Pada penelitian ini analisa bivariat dilakukan melalui uji crosstab/chi square untuk variabel dua kategori dengan tingkat kepercayaan 95% dan nilai  $\alpha = 0,05$ 

#### Hasil

Tabel 1 menunjukkan bahwa 67 dari 110 responden (60.9%) berjenis kelamin laki-laki. Sebagian besar responden berada pada kelompok usia remaja akhir dengan rentang usia 17-25 tahun. Diketahui distribusi responden berdasarkan status perkawinan, bahwa 53 orang responden (48.2%) memiliki status belum menikah, 50 orang responden (45.5%) memiliki status menikah, 4 orang responden (3,6%) memiliki status bercerai hidup, 2 orang responden (1,8%) memiliki status menikah namun hidup terpisah dan 1 orang responden (0,9%) memiliki status bercerai mati. Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, yaitu sebanyak 59 orang responden (53.6%). Saat penelitian berlangsung sebagian besar responden memiliki pekerjaan tidak tetap atau tidak bekerja, yaitu sebanyak 50 responden (45,5%).

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif terhadap BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 63 orang dengan proporsi 57,3%. Kemudian berdasarkan distribusi variabel norma subjektif proporsi responden yang memiliki norma positif sama besar dengan proporsi responden yang memiliki norma negatif, dengan besar proporsi yaitu 55%. Pada distribusi variabel pengendalian perilaku, diketahui 53,6% responden memiliki pengendalian perilaku positif. Sedangkan berdasarkan distribusi pada variabel niat membayar, diketahui 58 dari 110 orang responden memiliki niat membayar lebih dari Rp. 25.500.

Hasil analisis bivariat yang disajikan pada tabel 3. menunjukkan bahwa pada  $\alpha = 5\%$  terdapat hubungan yang signifikan antara variabel sikap dan niat membayar iuran JKN dengan p-value sebesar 0,027. Kemudian pada variabel norma subjektif dan pengendalian perilaku dengan niat membayar iuran JKN diketahui tidak terdapat hubungan yang signifikan, dengan p-value masing-masing sebesar 0,340 dan 0,093. Adapun nilai OR dari variabel sikap, norma subjektif dan pengendalian perilaku yaitu masing-masing sebesar 0,387, 1,552 dan 2,063.

Tabel 1. Karakteristik responden penelitian

1	pene	
Karakteristik Responden	n	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	67	60.9
Perempuan	43	39.1
Kelompok Usia		
Remaja Akhir (17-25 Tahun)	51	46.4
Dewasa Awal (26-35 Tahun)	26	23.6
Dewasa Akhir (36-45 Tahun)	14	12.7
Lansia Awal (46-55 Tahun)	15	13.6
Lansia Akhir (56-65 Tahun)	3	2.7
Manula (65 Tahun ke atas)	1	0.9
Status Perkawinan		
Menikah	50	45.5
Bercerai Hidup	4	3.6
Bercerai Mati	1	0.9
Belum Menikah	53	48.2
Menikah namun hidup terpisah	2	1.8
Pendidikan		
SD/Sederajat	2	1.8
SMP/Sederajat	1	0.9
SMA/Sederajat	59	53.6
Perguruan Tinggi	48	43.6
Pekerjaan		
Pekerjaan di bidang angkutan	17	15.5
Pekerjaan di bidang perdaganagan	14	12.7
Pekerjaan di bidang industry	9	8.2
Pekerjaan di bidang bangunan	2	1.8
Pekerjaan di bidang jasa	18	16.4
Tidak sedang bekerja/tidak tetap	50	45.5

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel Dependen dan Independen

Variabel	n	%				
Sikap						
Sikap Negatif	47	42.7%				
Sikap Positif	63	57.3%				
Norma Subjektif						
Norma Negatif	55	55.0%				
Norma Positif	55	50.0%				
Pengendalian Perilaku						
Pengendalian Negatif	51	46.4%				
Pengendalian Positif	59	53.6%				
Niat Membayar Iuran JKN						
Niat membayar iuran < Rp. 25.500	52	47.3%				
Niat membayar iuran $\geq$ Rp. 25.500	58	52.7%				

Tabel 3. Tabulasi Silang Sikap, Norma Subjektif dan Pengendalian Perilaku dengan Niat Membayar Iuran JKN

Niat membayar iuran JKN		
Niat membayar ≥		

	Rp. 25.500 < Rp. 25.500		Rp. 25.500			
	n	%	n	%	<del>_</del>	
Sikap						
Sikap Positif	27	42.9	36	57.1	0.387	0.027
Sikap Negatif	31	66.0	16	34.0		
Norma						
Norma Positif	32	58.2	23	41.8	1.552	0.340
Norma Negatif	26	47.3	29	52.7		
Pengendalian Perilaku						
Pengendalian Positif	36	61.0	23	39.0	2.042	0.002
Pengendalian Negatif	22	43.1	29	56.9	2.063	0.093

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 52,7% responden memiliki niat membayar iuran JKN ≥ median, yaitu sebesar Rp. 25.500. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berupaya untuk membayar iuran JKN dengan tarif setidaknya Rp. 25.500. Dalam penelitian ini, responden juga ditanyakan terkait *willingness to pay* terhadap iuran JKN. *Willingness to pay* diartikan sebagai harga maksimum dari suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada waktu tertentu (Sihaloho, 2015). *Willingness to pay* juga diartikan sebagai uang atau kompensasi yang siap dibayarkan oleh konsumen untuk suatu peningkatan/penurunan konsumsi produk (barang dan jasa) yang diinginkan (Oktora, 2016).

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar (87,4%) responden memiliki *willingness to pay* sebesar Rp. 25.500. Artinya bahwa tarif maksimum yang mau dan siap dibayarkan oleh responden untuk program JKN adalah sebesar Rp. 25.500. Hasil penelitian menegaskan bahwa tarif yang diusahakan dan siap dibayarkan oleh peserta adalah sebesar Rp. 25.500. Maka dapat diketahui juga bahwa responden tidak siap untuk membayarkan iuran yang dinaikkan menjadi Rp. 35.000 pada bulan Juli 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Niat membayar iuran JKN pada responden dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh adanya pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Indonesia sejak Maret 2020. Perkembangan pandemi COVID-19 yang cepat dan dinamis tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat namun juga sektor perekonomian. Diperkirakan perekonomian global tahun 2020 akan tumbuh negatif atau mengalami kemerosotan. Pada tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun menjadi 2,3% pada skenario berat dan berlanjut menjadi -0,4% pada skenario sangat berat (Kementerian Keuangan RI, 2020). Pelemahan ekonomi ini kemudian akan berdampak pada rumah tangga. Masyarakat terancam kehilangan pendapatan dan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama masyarakat rentan seperti masyarakat miskin dan pekerja harian atau pekerja sektor informal (ILO, 2020) (BPJS, 2020).

Adanya kenaikan iuran JKN ditengah pandemi ini hanya akan memberatkan masyarakat yang kehilangan pendapatannya, dan dapat menurunkan niat masyarakat dalam membayar iuran JKN. Hal ini dapat ditunjukkan dengan proporsi peserta tidak aktif yang meningkat selama pandemi ini. Sebelum pandemi, pada Februari 2020 diketahui peserta tidak aktif di Indonesia memiliki proporsi sebesar 50%. Kemudian setelah terjadi pandemi, pada Juni 2020 diketahui proporsi tersebut meningkat mencapai 75.4% (DJSN 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel sikap dengan niat membayar iuran JKN (*p-value* 0,027). Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap seseorang terhadap BPJS Kesehatan, maka semakin besar niat nya membayar iuran JKN. Sikap positif terhadap BPJS Kesehatan tersebut diperoleh dari keyakinan dan evaluasi seseorang terhadap BPJS Kesehatan. Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Brahmana (Brahmana et al., 2018), dimana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa sikap berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan seseorang dalam membayar asuransi kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (Pratiwi & Hartoyo, 2014) juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini, dimana sikap

terhadap asuransi berhubungan secara signifikan terhadap niat untuk membayar asuransi (*p-value* 0,01).

Sikap seseorang didapatkan dari hasil evaluasinya terhadap objek yang dimaksud (Ajzen & Fishbein, 1977). Sikap diukur melalui keyakinan seseorang terhadap hasil atau *outcome* dari perilaku tertentu yang kemudian dikalikan dengan evaluasi terhadap perilaku tersebut. Jika seseorang memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan suatu perilaku ia akan mendapatkan hasil yang positif, maka ia akan memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan perilaku ia akan mendapatkan hasil yang negatif, maka ia akan memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku (Glanz et al., 2008).

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner *online*. Instrumen ini digunakan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan *ethical issue*, dimana responden tidak dapat memahami atau bahkan tidak membaca penjelasan penelitian secara utuh (Nayak & Narayan, 2019). Penelitian ini tidak dapat menggambarkan sebab akibat variabel penelitian berdasarkan kurun waktu, hal ini dikarenakan peneliti menggunakan desain studi *cross sectional* dimana variabel dependen dan independent diukur dalam waktu bersamaan. Penelitian ini kurang dapat menggeneralisasikan gambaran kemauan membayar iuran pada pekerja informal di kota depok, karena sampel tidak diambil secara proporsional untuk mewakili masing-masing daerah di kota depok (seperti mewakili masing-masing kecamatan).

# Simpulan

Sebagian besar responden (57%) memiliki niat untuk membayar iuran JKN dengan tarif setidaknya Rp. 25.500. Niat responden sejalan dengan willingness to pay terhadap iuran JKN, dimana tarif yang diusahakan dan siap dibayarkan oleh peserta adalah sebesar Rp. 25.500. Adanya hubungan yang signifikan antara variabel sikap dan niat membayar iuran JKN (p-value 0,027). Dimana sebagian besar responden (57,27%) memiliki sikap yang positif terhadap BPJS Kesehatan. Kemudian diketahui tidak adanya hubungan yang signifikan pada variabel norma subjektif (p-value 0,340) dan pengendalian perilaku (p-value 0.093) terhadap niat membayar iuran JKN..

### Daftar Pustaka

- Ajzen, I. 1991. 'The Theory of Planned Behavior'. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 50, 179–211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. 1977. 'Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis and Review of Empirical Research'. Psychological Bulletin, 84(5), 888–918.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. 2005. 'The Influence of Attitudes on Behavior'. In The Handbook of Attitudes (Vol. 31, pp. 173–221).
- Azizam, N. A., Dzulkipli, M. R., Shamimi, N. I., Maon, S. N., John, D., Belawing, J., Jawa, J., & Yahaya, N. 2020. 'Applicability of Theory of Planned Behavior and Protection Motivation Theory in Predicting Intention to Purchase Health Insurance'. ADVANCES IN BUSINESS RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL, 6(1), 41. https://doi.org/10.24191/abrij.v6i1.9939
- BPJS. 2014a. Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- BPJS. 2014b. Pedoman Umum Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) Bpjs Kesehatan.
- Brahmana, R., Brahmana, R. K., & Memarista, G. 2018. 'Planned Behaviour in Purchasing Health Insurance'. The South East Asian Journal of Management, 12(1). https://doi.org/10.21002/seam.v12i1.7465
- DJSN. (2020). *SISMONEV TERPADU JKN / Aspek Kepesertaan*. http://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/index.php
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Kasisomayajula, V. 2008. *Health behavior and health education: Theory, research, and practice* (4th ed.). Jossey-Bass.

- ILO. 2020. *Krisis COVID-19 dan sektor informal: Respons langsung dan tantangan kebijakan*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\_744424.pdf
- Kementerian Keuangan RI. 2020. *Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi COVID-19*. https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf
- Nayak, M. S. D. P., & Narayan, K. A. 2019. 'Strengths and Weakness of Online Surveys'. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 24(5), 31–38.
- Nurbaeti, & Batara, A. S. 2018.'Kemampuan Membayar Iuran Bpjs Bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal (Studi Pada Tukang Ojek Dan Becak/ Bentor)'. PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(2), 165–172.
- Oktora, R. 2016. Determinan willingness to pay iuran jaminan kesehatan pada sektor informal (pengemudi ojek pangkalan) di Kota Depok tahun 2016. Universitas Indonesia.
- Pratiwi, N. A., & Hartoyo, H. 2014. 'Analisis Niat Beli Asuransi Jiwa pada Mahasiswa: Aplikasi Theory of Planned Behavior'. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 7(1), 58–66. https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.1.58
- Sihaloho, E. N. 2015. Determinan Kemauan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Triwardani, Y. 2017. Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Pasien BPJS Pada Pelayanan Di Puskesmas Pamulang. Universitas Islam Negeri Jakarta.